

FAKTOR INTERNAL PELAKSANAAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA TAHUN 2014 DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

Sugino ¹, A.B. Tangdililing ², Gusti Suriyansyah ³

Program Studi Ilmu Politik
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tesis ini berjudul : “ Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikong”. Tesis ini bermaksud menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan pada Pemilu tersebut. Tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran politik masyarakat perbatasan, intrik kepentingan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat perbatasan memahami bahwa partisipasi politik mereka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu perwujudan hak asasi politik warga negara dalam sistem demokrasi. Mereka juga memahami partisipasi politik mereka sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan perbaikan dan peningkatan kehidupan sosial. Dan untuk itu masyarakat perbatasan berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih mengkomudir dan menjawab kebutuhan dasar hidup yang menjadi pokok permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi adalah: infrastruktur, transportasi, pertumbuhan ekonomi, penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ancaman adanya potensi desitegrasi bangsa.

Kata Kunci: partisipasi politik, masyarakat perbatasan, Pemilu

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia politik dikenal berbagai istilah, seperti: ilmu politik, teori politik, sistem politik, ide politik, lembaga politik, konsep politik, filsafat politik, sosialisasi politik, budaya politik, etika politik, estetika politik, logika politik, aturan politik, kegiatan politik, pergerakan politik, aksi politik, pembangunan politik, metodologi politik, dinamika politik, partai politik, kekuatan politik, ekonomi politik, psikologi politik, keyakinan politik, formula politik, bahasa politik, strategi politik, pendekatan politik, partisipasi politik, politik nasional, politik regional, politik internasional, politik dalam negeri, politik luar negeri dan seterusnya. Istilah-istilah di atas senantiasa dibahas dalam dunia politik atau sekurang-kurangnya sudah dipahami para politikus atau para penggemar politik.

Tesis ini mendiskusikan isu tentang partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Entikong. Karena itu tesis ini bermaksud mengungkap dan menjelaskan hasil partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu tersebut menggunakan teori/pendekatan behavioralsehingga diperoleh penjelasan deskriptif-ilmiah untuk memperkaya dan memperluas cakrawala politik.

Edi Wibowo (dalam Efriza, 2013: 24) menguraikan tentang pendekatan-pendekatan dalam Ilmu politik. Beliau membedakan teori behavioral menjadi dua pendekatan, yakni: pendekatan tingkah laku dan pluralisme. Pendekatan tingkah laku menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu sedangkan pendekatan pluralisme menyoroti interaksi dan kooperatif antar manusia yang membentuk tingkah laku organisasi. Bidang kajian pendekatan tingkah laku meliputi: opini publik, *voting*, koalisi, kekerasan, politik, negosiasi, dan lobi. Sedangkan pendekatan pluralisme meliputi: partai politik, sistem pemilu, dan tingkah laku legislative.

Voting(pemberian suara) merupakan salah satu bentuk partisipasi politikbidang kajian pendekatan pluralisme meliputi: partai politik, sistem pemilu, dan tingkah laku legislative. yang dilakukan dengan cara mencoblos atau mencentang tanda gambar atau nomor urut calon anggota legislatif yang akan duduk di parlemen atau calon eksekutif yang akan duduk di tampuk pimpinan kepala daerah atau kepala negara. Pada tanggal 9 Juli 2014 masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong dan seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di dalam maupun Luar Negeri melakukan pencoblosan di masing-masing TPS maupun TPSLN untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia masa bakti tahun 2014 – 2019. Berpartisipasi dalam politik (salah satunya adalah pemberian suara) merupakan salah satu hak asasi politik rakyat atau sebuah kemaslahatan politik dalam koridor demokrasi.

Pemilu merupakan modal utama dan kekuatan dinamis untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju ke arah cita-cita bersama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat : UUD'45). Partisipasi politik masyarakat juga merupakan daya, tenaga, kekuatan, dan kemampuan untuk bergerak, bergeser, berpindah ke posisi yang dicita-citakan pembangunan nasional. Partisipasi politik masyarakat mengandung akumulasi berbagai kebutuhan/kepentingan (needs) masyarakat yang perlu diakomodir dan diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Partisipasi politik masyarakat merupakan amanah dan titipan kepercayaan. Karena itu, partisipasi politik masyarakat harus dipelihara dan direalisasikan dalam pembangunan nasional. Sehingga partisipasi

politik masyarakat benar-benar membawa manfaat yang cukup signifikan ke arah peningkatan kualitas hidup yang lebih baik di seluruh bidang kehidupan sesuai dengan cita-cita nasional (masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila).

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada factor internal pelaksanaan partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Entikong. Potret kehidupan masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong merupakan bagian *icondari* potret kehidupan masyarakat Indonesia. Akar permasalahan kehidupan sosial yang timbul di pentas batas negarasebagai akibat paradigma/perspektif/pendekatan yang berbeda di antara kedua negara dalam hal mengelola teras internasional negara masing-masing.

Kesenjangan sosial menjadi isu sentral dalam berbagai studi pembangunan kawasan perbatasan yang disuarakan melalui berbagai media cetak dan elektronik. Demikian, kesenjangan sosial masyarakat perbatasan menyentuh para pemerhati bangsa, terutama para pejabat publik, pemimpin spiritual atau pemimpin agama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para wakil rakyat yang duduk di jajaran DPR dan MPR. Karena tidak puas dengan sentuhan pembangunan nasional yang ada maka masyarakat perbatasan dan para pemerhati tak henti-hentinya mengangkat semua icon perbatasan dalam berbagai cara dan kesempatan terutama melalui program kampanye Pemilu, baik dalam program kampanye Pemilukada, Pilleg, maupun dalam program kampanye Pilpres dan Pilwapres, khususnya kampanye pilpres-wapres pada tahun 2014.

Dalam kampanye Pemilu tersebut kepada masyarakat di wilayah perbatasan ditawarkan solusi untuk keluar dari berbagai masalah yang mereka hadapi dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu, termasuk memberikan dukungan suaradengan cara mencoblos tanda gambar calon pemimpin yang diunggulkan di dalam bilik suara yang sudah disiapkan oleh KPU.

Semangat reformasimemberi dan membuka ruang seluas-luasnya bagipembangunan dan pendidikan politik demokrasi di tanah air. Hal ini terbukti pada Pemilu tahun 1999 ternyata partisipasi politik masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas yang cukup signifikan. Pada Pemilu tahun 1999 jumlah partai yang ikut bertarung jauh lebih banyak dibandingkan dengan peserta pemilu sebelumnya. Selain itu kebebasan berpolitik di dalam negeri juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan bagi segenap warga negara mendirikan partai-partai baru. Melalui partai-partai baru tersebut masyarakat dapat melaksanakan partisipasi politik mereka baik melalui Pemilu Legislatif, Pemilukada, maupun Pilpres- Pilwapres.

Sistem pelaksanaan Pemilu di Indonesia sejak Pemilu pertama tahun 1955 hingga sekarang terus berkembang. Perkembangan tersebut tampak misalnya pada Pemilu tahun 2004 untuk pertama kalinya rakyat secara langsung memilih anggota legislatif dan presiden-wakil presiden. Selanjutnya, pada Pemilu tahun 2009 untuk kedua kalinya Pemilu Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan, pada Pemilu tahun 2014 untuk ketiga kalinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong melaksanakan partisipasi politik mereka melalui agenda Pemilu yang ditentukan oleh KPU. Dalam masa kampanye, KPU memberi ruang gerak kepada para kandidat Presiden-Wakil Presiden bersama partai pengusung untuk melakukan agenda kampanye melalui orasi atau debat antar kandidat Capres dan Cawapres.

Beberapa isu digulirkan dalam debat tersebut, antara lain : isus tentang energi baru dan terbarukan, kemandirian pangan, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, pendidikan, Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan isu tentang kesehatan. Semua isu nasional, termasuk berbagai isu yang diangkat dalam debat di atas berada dalam lingkup politik nasional yang membuka ruang partisipasi politik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, ruang lingkup partisipasi politik masyarakat seluas segala isu politik nasional. Karena itu, mengingat luasnya bidang kajian dan ruang lingkup partisipasi politik masyarakat maka penelitian ini hanya difokuskan pada partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Entikong. Untuk itu tesis ini bermaksud mengangkat dan memaparkan isu faktor internal pelaksanaan partisipasi politik masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014.

3. Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada : Bagaimana faktor internal pelaksanaan partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Entikong.

B. TINJAUAN LITERATUR

Menurut Leo Agustino, partisipasi politik diartikan sebagai perilaku politik atau peran serta warga negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan publik: Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik. Kegiatan warga negara pada dasarnya dibagi dua, yakni (1) mempengaruhi isi kebijakan umum, dan (2) ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan publik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik; tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik (2007:59). Selanjutnya menurut Nie dan Verba, partisipasi politik diartikan sebagai

“ kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan mereka” (dalam Leo Agustino, 2007:59). Senada dengan pernyataan Nie dan Verba di atas maka Parry, Mosley, dan Day juga mengartikan partisipasi politik sebagai *“keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah” (dalam Leo Agustino, 2007:59)*

Pemilu merupakan modal utama dan kekuatan dinamis untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju ke arah cita-cita bersama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat : UUD'45). Pemahaman ini mengartikulasikan kata polis menjadi politik atau “politeia” (Leo Agustino, 2006:33-34). Sistem ini juga semakin memperjelas posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan, karena sebelumnya hanya elite politik terpilih yang dapat menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di masa mendatang. Tetapi sejak Pemilu tahun 2004 Indonesia dianggap berhasil menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dan menjadi negara demokratis ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India (Syamsuddin Haris, 2005: XV).

Michael Rush dan Phillip Althoff (dalam Kartini Kartono, 2011: 121-180) membedakan partisipasi politik dalam empat sudut pandang, yakni: 1) bentuk partisipasi politik; 2) luas partisipasi politik; 3) orang-orang yang berpartisipasi; dan 4) motivasi yang mendorong orang berpartisipasi. Partisipasi politik adalah jumlah dan intensitas

individu dan kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut menentukan pemimpin daerah. (Surbakti, 1999: 118). Partisipasi merupakan usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. (Michael Rush & Phillip Althoff, 2000). Michael Rush & Philip Althoff (dalam Kartini Kartono, 2011 : 122) membagi tipe-tipe partisipasi politik masyarakat ke dalam 8 hirarki tipe (dari hirarki tipe yang paling dasar hingga hirarki tipe yang paling puncak), yakni : (1) partisipasi dalam diskusi politik; (2) partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain; (3) keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik; (4) keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik; (5) keanggotaan pasif suatu organisasi politik; (6) keanggotaan aktif suatu organisasi politik; (7) mencari jabatan politik atau organisasi; dan (8) menduduki jabatan politik atau administrasi (2011:122). Michael Rush dan Phillip Althoff (dalam Kartini Kartono, 2011: 121-180) membedakan partisipasi politik dalam empat sudut pandang, yakni: 1) bentuk partisipasi politik; 2) luas partisipasi politik; 3) orang-orang yang berpartisipasi; dan 4) motivasi yang mendorong orang berpartisipasi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik tersebut menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan – tujuan yang telah dipilih tersebut. (Budiardjo, 2003:8).

Ramlan Surbakti (2007:109-110) menjelaskan tentang adanya berbagai kelompok kepentingan (interest group) dalam masyarakat yang berusaha mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tertentu kelompok kepentingan kepada kewenangan yang ada (pemerintah) supaya menampung kepentingan kelompok ketika pemerintah menyusun kebijakan. Sehingga Ramlan (2007:109) mendefinisikan kelompok kepentingan (interest) group sebagai “*sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.*”. Kelompok kepentingan dalam masyarakat sangat banyak dan kepentingan mereka pun beraneka ragam dan terkadang kepentingan kelompok bertentangan satu sama lain. Fungsi partai di tengah-tengah kelompok-kelompok kepentingan yang beraneka ragam tersebut adalah berusaha “*memadukan berbagai kepentingan menjadi beberapa alternative kebijakan umum yang dijadikan sebagai keputusan politik.*” (Ramlan Surbakti, 2007:109). Terkait dengan diskusi ini, maka fungsi lain partai politik adalah

“*mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah sebagai sarana untuk memperjuangkan alternative kebijakan umum menjadi keputusan politik.*” (Ramlan Surbakti, 2007:109).

Jadi, partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat perbatasan di kecamatan Entikong berharap agar kewenangan yang ada mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka dalam kebijakan umum menjadi keputusan politik.

Kepercayaan (credibility) politik adalah keyakinan atau sikap positif masyarakat terhadap kewenangan dan/atau pemerintah atau penyelenggara negara. Di satu sisi Ramlan Surbakti (2007:90) mengelompokkan sikap masyarakat terhadap kewenangan yang ada atau pemerintah menjadi tiga jenis sikap, yakni: “*sikap menerima,*

mempertanyakan (*skeptis*), dan kombinasi keduanya.”Sementara di sisi lain, Ramlan Surbakti (2007:91) membedakan sikap masyarakat terhadap kewenangan atau pemerintah berdasarkan kelompok suku dalam masyarakat, terpelajar – tidak terpelajar, orang kota – orang desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas 4 pertimbangan yakni tingginya partisipasi politik masyarakat di perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, persamaan garis keturunan dan budaya, adanya kesenjangan sosial-ekonomi antara masyarakat perbatasan Indonesia dengan Sarawak-Malaysia, dan terakhir lokasi geografis kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Subjek Penelitian adalah masyarakat perbatasan yang terlibat dalam Pemilu Presiden, informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* selain itu juga harus memenuhi kriteria seperti dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta memahami pemilu dan daerah perbatasan.

Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) sebelum dan sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 berlangsung. Data yang didapatkan dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan dari penelitian ini kemudian diuraikan untuk ditampilkan sehingga dapat dilihat gambaran untuk menyimpulkan secara tepat. Kemudian data di *crosscheck* untuk mencapai validitas yang obyektif. Dari pengolahan data tersebut kemudian penulis dapat menarik kesimpulan terkait isu yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN

1. Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikong.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Entikong ditentukan oleh faktor internal. Tingkat partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Entikong sangat ditentukan oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. yang terdiri dari: kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan, figure capres-cawapres, mobilisasi massa, peran tokoh masyarakat dan aktor partai. Berikut ini diuraikan kedua faktor berpengaruh tersebut di atas.

Faktor internal adalah faktor penyebab tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong dalam Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang lahir dari dalam diri mereka sendiri. Faktor internal, terdiri dari empat jenis, yakni: tingkat kesadaran politik masyarakat perbatasan, keputusan yang mengikat, adanya motivasi atau intrik kepentingan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Ramlan Surbakti (2007:117-118) menjelaskan bahwa dalam proses dan sistem politik, sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik. Sosialisasi politik merupakan serangkaian kegiatan (salah satunya, penyampaian pesan politik) partai politik dalam membentuk sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

Tesis Jeffrey M. Paige (dalam Ramlan Surbakti, 2007:144) menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kesadaran politik rakyat dan kredibilitas rakyat terhadap pemerintah

dengan tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses politik. Argumentasi Paige adalah bahwa jika kesadaran politik masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah tinggi maka tingkat partisipasi politik masyarakat cenderung naik, tinggi, dan aktif tetapi sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rendah maka tingkat partisipasi politik masyarakat cenderung rendah, pasif, dan apatis.

Hasil perhitungan suara Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 pada masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong mencapai angka 7.697 suara (85,89%) dari jumlah DPT wilayah perbatasan sebanyak 8.960 orang pemilih. Angka partisipasi politik masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong termasuk dalam kategori sangat tinggi atau sangat signifikan. Tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu tersebut (jika mengacu kepada tesis Paige) disebabkan oleh tingginya kesadaran politik mereka.

Ramlan Surbakti mengapresiasi kesadaran politik masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah (tesis Paige) sebagai faktor penyebab tinggi-rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses politik. Namun, disamping itu Ramlan juga menyebutkan beberapa faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses politik. Menurut Ramlan (2007:144-145), faktor-faktor lain seperti status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Gene Sharp dan David Easton (dalam Ramlan Surbakti, 2007:17) mengemukakan berbagai alasan yang memaksa masyarakat harus mengikuti keputusan politik orang tua atau kewenangan yang ada. Menurut Gene Sharp ada tujuh alasan, yakni: karena tradisi, takut akan paksaan, kewajiban moral, kepentingan sendiri, identifikasi psikologis dengan penguasa, dan karena kurang percaya diri pada masyarakat. Sedangkan menurut David Easton, ada lima alasan, yakni: takut akan paksaan fisik, takut dikucilkan masyarakat, kepentingan diri sendiri, tradisi dan kesetiaan, dan kesadaran hukum.

Ramlan Surbakti (2007:109-110) menjelaskan tentang adanya berbagai kelompok kepentingan (interest group) dalam masyarakat yang berusaha mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tertentu kelompok kepentingan kepada kewenangan yang ada (pemerintah) supaya menampung kepentingan kelompok ketika pemerintah menyusun kebijakan. Sehingga Ramlan (2007:109) mendefinisikan kelompok kepentingan (interest) group sebagai *“sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.”* Kelompok kepentingan dalam masyarakat sangat banyak dan kepentingan mereka pun beraneka ragam dan terkadang kepentingan kelompok bertentangan satu sama lain. Fungsi partai di tengah-tengah kelompok-kelompok kepentingan yang beraneka ragam tersebut adalah berusaha *“memadukan berbagai kepentingan menjadi beberapa alternative kebijakan umum yang dijadikan sebagai keputusan politik.”* (Ramlan Surbakti, 2007:109). Terkait dengan diskusi ini, maka fungsi lain partai politik adalah

“mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah sebagai sarana untuk memperjuangkan alternative kebijakan umum menjadi keputusan politik.” (Ramlan Surbakti, 2007:109).

Jadi, partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat perbatasan di kecamatan Entikong berharap agar kewenangan yang ada mengakomodir

kepentingan-kepentingan mereka dalam kebijakan umum menjadi keputusan politik. Kepercayaan (credibility) politik adalah keyakinan atau sikap positif masyarakat terhadap kewenangan dan/atau pemerintah atau penyelenggara negara. Di satu sisi Ramlan Surbakti (2007:90) mengelompokkan sikap masyarakat terhadap kewenangan yang ada atau pemerintah menjadi tiga jenis sikap, yakni: “*sikap menerima, mempertanyakan (skeptis), dan kombinasi keduanya.*” Sementara di sisi lain, Ramlan Surbakti (2007:91) membedakan sikap masyarakat terhadap kewenangan atau pemerintah berdasarkan kelompok suku dalam masyarakat, terpelajar – tidak terpelajar, orang kota – orang desa.

Jika konsep Ramlan Surbakti di atas ditarik dan dipetakan pada partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 maka respon atau sikap politik masyarakat perbatasan terhadap kewenangan atau pemerintah yang ada termasuk dalam kategori menerima alias percaya dengan kualifikasi tinggi (85,89%) sesuai dengan tesis Jeffry M. Paige.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor penyebab tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 adalah karena adanya pengaruh faktor internal dan eksternal yang terdapat pada masyarakat perbatasan. Faktor ini menjadi kunci utama untuk menaikkan partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu berikutnya. Untuk itu kerjasama yang baik antara kelompok kepentingan yang dibina sejak dini. Kerjasama antar kelompok kepentingan yang dimaksud, misalnya Pemda, aktor politik, dan tokoh masyarakat:

- a. menjadi pionir dan pelopor pembangunan politik masyarakat perbatasan;
- b. mengagendakan dan menetapkan secara berkala pembangunan masyarakat perbatasan di lintas sektoral;
- c. merumuskan konsep pembangunan masyarakat perbatasan berskala internasional dalam konstelasi nasional dan sebaliknya;
- d. mengawal implementasi komitmen politik yang sudah disepakati antara masyarakat dengan partai;
- e. meningkatkan kegiatan edukasi politik kepada masyarakat demi menciptakan masyarakat yang melek dan sadar politik;
- f. Mengkomunikasikan secara horizontal dan vertikal setiap perubahan dalam pembangunan politik di kawasan perbatasan;
- g. Menjadi motor penggerak pembangunan dan pengembangan kehidupan sosial lintas sektoral bagi masyarakat perbatasan guna memahami gerakan ekonomi dan perpolitikan Nasional Indonesia.

2. Saran

Presiden dan wakil presiden diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan dasar hidup yang menjadi pokok permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi adalah: infrastruktur, transportasi, pertumbuhan ekonomi, penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ancaman adanya potensi desintegrasi bangsa. Agar masyarakat perbatasan dapat meningkatkan pandangan politik, intrik kepentingan, dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung :Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Syamsuddin. 2004. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai : Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 1971. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Dan Amandemennya : Dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu 2 Masa Bakti 2009 – 2014*. Solo :Sendang Ilmu.

